

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya akan digambarkan melalui adanya laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat akan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu contoh pengguna laporan keuangan adalah investor. Sebagai penanam modal, para investor dapat memprediksi laba di masa yang akan datang ataupun menaksir risiko investasi melalui laporan keuangan, sehingga para investor dapat menentukan apakah investor harus membeli, menahan, ataupun menjual investasi tersebut. Agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya, laporan keuangan tersebut harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum (Rahmawati, 2010).

Salah satu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah laba. Pertanyaan mendasar yang timbul adalah apakah manajemen telah menyajikan laba dengan benar dengan tidak melakukan manajemen laba. Manajemen laba dapat terjadi karena adanya kebebasan penggunaan metode dan estimasi akuntansi. Setiap tahunnya perusahaan diwajibkan membayar pajak dari penghasilan yang mereka dapat. Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak

perusahaan kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, pemilik perusahaan diduga akan cenderung meminta manajemen perusahaan melakukan manajemen laba ataupun tindakan pajak agresif (Chen et al, 2010; dalam Sari dan Martani, 2010). Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong *tax avoidance* atau tergolong *tax evasion* (Frank et al, 2009; dalam Sari dan Martani, 2010). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak terutang dengan cara memanfaatkan celah-celah atau kelemahan peraturan perpajakan tetapi masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga hal ini masih dapat dibenarkan. *Tax evasion* atau penggelapan pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Pada tahun 2008, Direktorat Jendral Pajak Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009. Perubahan dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Sebelum tahun 2009

tarif pajak Penghasilan Badan di Indonesia adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberi banyak keuntungan bagi banyak pengusaha karena dengan berlakunya peraturan ini maka tarif pajak penghasilan badan mengalami perubahan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Tarif pajak penghasilan badan berubah menjadi 28% yang diefektifkan pada tahun 2009 dan 25% yang diefektifkan pada tahun 2010. Bagi perusahaan yang telah *go public* memiliki tarif lebih rendah 5% yaitu sebesar 23% dengan syarat minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang perdagangan dimiliki paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku pada tahun 1984, UU PPh tahun 1994 yang berlaku pada tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang berlaku pada tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010. Perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tentunya sangat menguntungkan perusahaan khususnya yang telah *go public* karena tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil. Bagi perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya penurunan tarif ini dapat dijadikan momen yang dapat digunakan oleh

manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna meminimalkan beban pajak penghasilannya. Tindakan manajemen laba dapat terjadi karena didasari oleh perilaku *opportunistic* dari manajer. Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk melakukan manajemen laba atas penurunan tarif pajak ini adalah *tax shifting* yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum penurunan ke laba sesudah penurunan tarif pajak. Menurut akuntansi penundaan pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya merupakan hal yang dapat diterima karena akuntansi menganut prinsip *accrual basis*, sehingga pengakuan pendapatan dan beban dapat terjadi tanpa memperhatikan waktu penerimaan maupun pengeluaran kas dari pendapatan/biaya yang bersangkutan (Wijaya dan Martani, 2011).

Hidayati dan Zulaikha (2003) meneliti apakah perubahan UU PPh tahun 1994 menjadi UU PPh tahun 2000 direspon oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba guna meminimalkan beban pajak penghasilan melalui rekayasa *discretionary accrual*. Dalam mendeteksi adanya manajemen laba, Hidayati dan Zulaikha (2003) menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003) memberikan bukti bahwa perubahan Undang-Undang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan tahun 2000 yang mengubah tarif dan lapisan penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak Badan tidak direspon oleh Wajib Pajak yang bersangkutan untuk melakukan manajemen laba melalui rekayasa *discretionary accrual* guna meminimalkan beban pajak perusahaan.

Menurut Subagyo dan Oktavia (2010) kelemahan dari penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003) terletak pada metodologi penelitiannya, karena peneliti hanya menggunakan uji beda dalam mendeteksi manajemen laba. Keterbatasan penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003) adalah jumlah sampel yang digunakan sangat kurang yaitu hanya 25 perusahaan dari total 157 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

Subagyo dan Oktavia (2010) melakukan penyempurnaan atas penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2001) serta Hidayati dan Zulaikha (2003). Subagyo dan Oktavia (2010) memberikan bukti bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia adalah perusahaan yang memperoleh laba. Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian tidak melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia, karena sesuai peraturan pajak yang ditetapkan bagi perusahaan yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak dan perusahaan tersebut memperoleh fasilitas kompensasi kerugian dari Pemerintah.

Menurut Yin dan Cheng (2004, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010) manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon perubahan tarif pajak turut dipengaruhi oleh insentif pajak dan non insentif pajak. Variabel insentif pajak dalam penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) yaitu perencanaan pajak. Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka akan

mendapatkan keuntungan dari *tax shields* dan dapat meminimalisasi beban pajak perusahaan. Variabel non insentif pajak dalam penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) adalah *earnings pressure*, tingkat utang, *earnings bath*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Bagi perusahaan yang labanya telah mencapai target, penurunan laba dapat dilakukan dengan *earnings pressure*. *Earnings pressure* dilakukan dengan menurunkan akrual yang bersifat menurunkan laba sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi kecil. Penurunan laba juga dapat dilakukan dengan meningkatkan utang karena dengan meningkatkan utang maka beban bunga akan semakin besar. *Earnings bath* yang dimaksud dalam penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) adalah *taking a bath* yang merupakan salah satu pola dari manajemen laba. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai, oleh karena itu perusahaan dapat mengatur kegiatan mereka untuk mencapai target yang mereka inginkan misalnya untuk penghematan pajak. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer perusahaan memiliki saham di perusahaan tersebut, ketika terdapat kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan maka manajer akan melakukan manajemen laba karena pemilik cenderung menginginkan perusahaan memiliki beban pajak yang kecil.

Subagyo dan Oktavia (2010) menguji pengaruh insentif pajak dan non insentif pajak terhadap manajemen laba. Penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) memberikan bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang memperoleh laba dipengaruhi oleh insentif pajak yaitu perencanaan pajak, dan non insentif pajak yaitu

earnings pressure. Bagi perusahaan yang mengalami kerugian, manajemen laba dipengaruhi oleh non insentif pajak yaitu *earnings pressure*. Subagyo dan Oktavia (2010) memberikan pula bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sampel ternyata tidak dipengaruhi oleh persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI. Penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) memiliki beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan pertama yaitu hanya meneliti sampel perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. Keterbatasan yang kedua adalah penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) menggunakan periode pengamatan manajemen laba yang relatif pendek, yaitu 2008 dan 2009 saja. Keterbatasan ketiga adalah hanya menggunakan satu variabel pengukuran insentif pajak saja yaitu perencanaan pajak.

Wijaya dan Martani (2011) melakukan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010). Wijaya dan Martani (2011) menambahkan variabel insentif pajak lain, yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih (*net deffered tax liability*). Menurut Yulianti (2005, dalam Wijaya dan Martani, 2011) faktor ini dianggap dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian karena ketika kewajiban pajak tangguhan meningkat berarti perusahaan diharuskan membayar beban pajak yang lebih tinggi. Penelitian Wijaya dan Martani (2011) memberikan bukti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia. Hal ini berarti bukan hanya perusahaan yang memperoleh laba yang

memanipulasi labanya, tetapi juga perusahaan yang mengalami kerugian. Penelitian Wijaya dan Martani (2011) juga memberikan bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang memperoleh laba dipengaruhi oleh insentif pajak yaitu perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih, dan non insentif pajak yaitu *earnings pressure*. Bagi perusahaan yang mengalami kerugian, manajemen laba dipengaruhi oleh insentif pajak yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih dan non insentif pajak yaitu *earnings pressure*. Selain itu, ditemukan pula bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan sampel (baik perusahaan yang memperoleh laba atau mengalami kerugian) ternyata tidak dipengaruhi oleh persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI. Penelitian Wijaya dan Martani (2011) memiliki beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan pertama yaitu penelitian Wijaya dan Martani (2011) menggunakan periode pengamatan manajemen laba yang relatif pendek, yaitu satu tahun sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (tahun 2008 dan 2009). Keterbatasan kedua yaitu faktor yang diteliti tidak memasukkan industri keuangan khususnya bank.

Fitriyani, Maiyarni, dan Gowon (2012) kemudian melakukan replikasi dan pengembangan penelitian Setiawati (2001) dan Wulandari, dkk. (2004) untuk mendapatkan bukti empiris mengenai praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas akrual sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian Fitriyani, dkk. (2012) memberikan bukti

bahwa ada perbedaan manajemen laba ditunjukkan dengan nilai *discretionary accrual*, pada periode sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Discretionary accrual* pada periode sesudah pemberlakuan lebih tinggi daripada periode sebelum, artinya perusahaan merespon perubahan tarif pajak penghasilan dengan cara melakukan manajemen laba. Fitriyani, dkk. (2012) menyarankan untuk memperluas jenis perusahaan yang akan diteliti, tidak hanya terfokus pada perusahaan manufaktur saja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Beberapa keterbatasan penelitian terdahulu membuat peneliti semakin tertarik untuk meneliti kembali. Penelitian ini mereplikasi dan mengembangkan penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) dan Wijaya dan Martani (2011) untuk menguji dan menganalisis apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen untuk melakukan laba dengan membandingkan tingkat *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini juga akan menguji apakah insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan non insentif pajak (*earnings pressure*, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan manajemen laba yang relatif lebih panjang yaitu tahun 2007 hingga 2011. Tahun 2007 dipilih karena

untuk menguji apakah sebelum adanya perubahan UU PPh 2008 perusahaan sampel telah melakukan manajemen laba. Tahun 2010 dipilih karena pada tahun tersebut diefektifkan pula tarif pajak yang lebih rendah, dan untuk tahun 2011 dipilih karena untuk menguji apakah perusahaan sampel tetap melakukan manajemen laba setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia merespon manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan membandingkan tingkat *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
2. Apakah insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah non insentif pajak (*earnings pressure*, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan membandingkan tingkat *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk menguji apakah insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) berpengaruh terhadap manajemen laba.
3. Untuk menguji apakah non insentif pajak (*earnings pressure*, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap manajemen laba.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, berharap penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan terutama mengenai pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap perilaku manajemen laba perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh perubahan tarik pajak penghasilan badan terhadap perilaku manajemen laba perusahaan.
- b. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan untuk menilai kualitas laba yang dilaporkan perusahaan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.5. **Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis penelitian, rerangka berpikir dan model analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel. Berisi pula jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data

kemudian populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.